

Komunikasi Sumber Daya Aparatur Pemerintah dalam Penanggulangan Covid-19 Kepada Masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi

Adnan Aban¹, Seno Andri², Febri Yuliani³

^{1,2,3} Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Riau

Email : aadnanaban@gmail.com

Abstrak

Pada akhir Desember 2019 dunia dihadapkan dengan kemunculan Coronavirus baru yang bermula di Wuhan, Tiongkok dan dinamakan dengan virus Sars-CoV-2 dan penyakitnya disebut Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) termasuk di Indonesia. Tingginya tingkat penyebaran dan penularan Covid-19 menimbulkan berbagai dampak, diantaranya adalah dampak ekonomi, kesehatan, pendidikan, bahkan sosial. Komunikasi yang baik dalam penanggulangan wabah covid 19 ini sangat perlu dilakukan Pemerintah agar setiap program yang sudah direncanakan akan terlaksana dengan baik seperti bantuan sosial yang tepat sasaran, pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan dan tentunya mensukseskan program vaksinasi untuk meminimalisir penyebaran virus covid 19 ini. Aspek transmisi dalam komunikasi sumber daya aparatur pemerintah dalam penanggulangan penyebaran covid-19 kepada masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan baik. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan Instruksi Bupati dan Surat Edaran sebagai tindak lanjut Instruksi Pemerintah Provinsi Riau dan dikoordinasikan kepada *stakeholders* seperti Forum Pimpinan Daerah, Satuan Tugas (Satgas) Covid, Kepala Dinas, Camat, Lurah hingga relawan. Namun transmisi dalam penanggulangan ekonomi dengan memberikan Bantuan Sosial kepada masyarakat yang berdampak Covid-19 tidak berjalan dengan maksimal karena masih ditemukan masyarakat tidak mengetahui program sosial yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial, Bantuan Langsung Tunai dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi hingga Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa. Kejelasan informasi dalam komunikasi yang dilakukan aparatur pemerintah dalam penanganan covid-19 masih belum maksimal karena masih ditemukan masyarakat belum memahami tentang pentingnya menjaga kesehatan dengan melakukan protokol kesehatan dan melaksanakan vaksinasi, Pada proses penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Kuantan Singingi juga ditemukannya masyarakat yang tidak bisa memanfaatkan secara maksimal dana bantuan sosial. Komunikasi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat dalam penanganan Covid-19 belum berjalan dengan konsisten, berdasarkan temuan dilapangan bahwasanya aparatur pemerintah hanya melakukan beberapa kali memberikan edukasi dan pemahaman secara langsung dengan mengunjungi beberapa tempat keramaian, Faktor penghambat seperti kurangnya jumlah aparatur pemerintah ditingkat kelurahan hingga desa dalam memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan pendataan penerima bantuan sosial. Minimnya tingkat pendidikan sehingga masih ditemukan masyarakat yang tidak percaya dengan keberadaan virus corona ini. Selanjutnya masyarakat juga belum memahami secara keseluruhan anjuran dan pemahaman yang diberikan oleh aparatur pemerintah karena keterbatasan bahasa dalam berkomunikasi. Kurangnya anggaran dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat, salahsatunya adalah minimnya baliho dan spanduk-spanduk yang terpasang disetiap daerah di Kabupaten Kuantan Singingi

Kata Kunci: Komunikasi, Sumber Daya Aparatur, Penanggulangan Covid-19

Abstract

At the end of December 2019 the world was faced with the emergence of a new Coronavirus that started in Wuhan, China and was named the Sars-CoV-2 virus and the disease was called Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) including in Indonesia. The high rate of spread and transmission of Covid-19 causes various impacts, including economic, health, educational, and even social impacts. Good communication in overcoming the COVID-19 outbreak is very necessary for the Government so that every program that has been planned will be carried out properly, such as targeted social assistance, public understanding of the importance of maintaining health protocols and of course the success of the vaccination program to minimize the spread of the COVID-19 virus. The transmission aspect in communication of government apparatus resources in overcoming the spread of COVID-19 to the community in Kuantan Singingi Regency has been going well. The Kuantan Singingi Regency Government issued a Regent's Instruction and Circular as a follow-up to the Riau Provincial Government Instruction and coordinated it with stakeholders such as the Regional Leadership Forum, the Covid Task Force (Satgas), Head of Service, Camat, Lurah to volunteers. However, the transmission in economic response by providing Social Assistance to people affected by Covid-19 did not run optimally because it was still found that people did not know about the social programs issued by the Central Government through the Ministry of Social Affairs, Direct Cash Assistance from the Kuantan Singingi Regency Government to Direct Cash Assistance from Village Fund. Clarity of information in communication carried out by government officials in handling Covid-19 is still not optimal because it is still found that people do not understand the importance of maintaining health by implementing health protocols and carrying out vaccinations. maximum social assistance funds. Communication carried out by government officials to the community in handling Covid-19 has not been running consistently, based on findings in the field that government officials only provide education and understanding directly several times by visiting several crowded places. villages in providing education and understanding to the community in implementing health protocols and collecting data on social assistance recipients. The lack of education levels so that there are still people who do not believe in the existence of this corona virus. Furthermore, the community also does not fully understand the recommendations and understanding given by government officials due to language limitations in communicating. Lack of budget in communicating with the community, one of which is the lack of billboards and banners installed in every area in Kuantan Singingi Regency.

Keywords: *Communication, Apparatus Resources, Covid-19 Response*

PENDAHULUAN

Tingginya tingkat penyebaran dan penularan Covid-19 menimbulkan berbagai dampak, diantaranya adalah dampak ekonomi, kesehatan, pendidikan, bahkan sosial. Di Indonesia, pandemi ini telah menyebabkan meningkatnya angka pengangguran sebab banyaknya UMKM yang tidak mampu bertahan di masa Pandemi, tingkat kemiskinan di Indonesia yang mulai menurun saat ini kembali mengalami peningkatan. (*Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, 2020).

Komunikasi yang baik dalam penanggulangan wabah covid 19 ini sangat perlu dilakukan Pemerintah agar setiap program yang sudah direncanakan akan terlaksana dengan baik seperti bantuan sosial yang tepat sasaran, pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan dan tentunya mensukseskan program vaksinasi untuk meminimalisir penyebaran virus covid 19 ini. Dalam hal komunikasi penanggulangan covid 19 di Kabupaten Kuantan Singingi sangat diperlukan komunikasi apatur pemerintah yang terlibat langsung seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Satgas Covid 19, Camat, Lurah hingga Kepala Desa yang bisa memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar program penanggulangan ini bisa berjalan dengan baik.

Selain upaya penanggulangan dalam hal ekonomi dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, dalam hal kesehatan melalui Instruksi Bupati Kuantan Singingi Nomor 480/INS/2021/635 tentang pelaksanaan kegiatan penanggulangan dan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19). Sosialisasi dan memberikan edukasi tentang pentingnya Protokol kesehatan juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi guna menekan laju Penyebaran Covid 19 juga dengan mendatangi tempat-tempat umum seperti kantor dan jalan raya dan pasar, untuk di jalan raya pemerintah Provinsi Riau melalui Satuan Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi bersama dengan TNI, Polri serta untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat saat berkegiatan agar terus menggunakan masker.

Program penanggulangan covid 19 di Kabupaten Kuantan Singingi baik itu dalam segi ekonomi (bantuan sosial) dan segi kesehatan masih terjadi beberapa perseoran yakni pada tahun 2020 penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau jumlahnya 21.913 KPM. Namun pada 2021 jumlahnya berkurang menjadi 14.316 KPM. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Kuantan Singingi menyatakan penyebaran covid 19 di Kabupaten Kuantan Singingi termasuk kategori mengkhawatirkan. Bahkan positivity rate Kuantan Singingi berada di atas DKI Jakarta. Per tanggal 10 Agustus 2021, pemeriksaan spesimen swab sebanyak 14.461 sampel. Hasilnya, 9.002 sampel negatif dan 5.459 sampel positif, yang berarti positivity rate Kuantan Singingi 37.74 persen (Gorau.com)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (*qualitative research*) dengan jenis penelitian Deskriptif. Creswell dalam Raco (2013:9) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah sebagai satu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami satu gejala sentral. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dilakukan karena daerah tersebut masih dijumpai beberapa kendala dan fenomena didalam komunikasi sumber daya aparatur pemerintah dalam penanggulangan covid-19 kepada masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi.

Dikalangan peneliti kualitatif, istilah responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, menentukan Informan awal dipilih secara *Purposive*. Menurut Sugiono (2016:85) *Purposive* adalah sampel dengan kriteria dan syarat-syarat tertentu dan mengetahui fenomena penelitian yang sedang dilakukan.

Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Metode wawancara merupakan bentuk komunikasi verbal atau percakapan dengan maksud memperoleh informasi dari objek. Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 2009:186). Pada penelitian melakukan observasi kelapangan dengan mewawancarai narasumber atau informan namun peneliti tidak terlibat langsung pada pelaksanaan dana kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya peneliti menggali lebih dalam terkait informasi yang didapatkan pada saat wawancara, dan juga menganalisa dokumen-dokumen didapatkan yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Selain itu peneliti juga mengumpulkan literatur-literatur dan pustaka yang sesuai dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tranformasi Informasi (*Transmisi*)

George C. Edward III (Widodo, 2011) bahwa transmisi yang merupakan bagian dari komunikasi adalah persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif, yaitu bahwa para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Setiap kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tentunya harus ditransmisikan kepada pelaksana yang akan mengimplementasikan kepada masyarakat. Setiap kebijakan tersebut harus jelas dan harus dipahami oleh implementor. Pemerintah harus memahami bahwasanya proses transmisi ini sangatlah penting karena akan berdampak pada

pelaksanaan kebijakan tersebut, dengan transmisi yang baik maka keputusan-keputusan tersebut juga akan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat dan akan memiliki integritas yang tinggi pula.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pada penelitian ini aspek transmisi dalam komunikasi sumber daya aparatur pemerintah dalam penanggulangan penyebaran covid-19 kepada masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilakukan dan sudah maksimal, ini bisa dilihat bahwasanya Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengikuti dialog dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dalam melakukan penanggulangan covid-19. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan Instruksi Bupati dan Surat Edaran sebagai tindak lanjut Instruksi Pemerintah Provinsi Riau.

Instruksi dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bupati dikoordinasikan dan dilakukan beberapa komunikasi dengan berdialog dan rapat beberapa stakeholders seperti Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Satuan Tugas Covid-19, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan relawan covid-19. Didalam komunikasi tersebut dijelaskan terkait isi dari Instruksi dan Surat Edaran yang akan diterapkan dan dilaksanakan di setiap daerah yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dalam penanganan covid-19.

Setelah dilakukan koordinasi, maka aparatur pemerintah akan melakukan komunikasi dalam menyampaikan Instruksi dan Surat Edaran Bupati dalam hal penanganan Covid-19 di Kabupaten Kuantan Singingi dengan memberikan edukasi dan pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi.

Namun transmisi dalam penanggulangan ekonomi dengan memberikan Bantuan Sosial kepada masyarakat yang berdampak Covid-19 tidak berjalan dengan maksimal karena masih ditemukan masyarakat tidak mengetahui program sosial yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial, Bantuan Langsung Tunai dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi hingga Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa sehingga masyarakat masih ditemukan belum menerima bantuan sosial tersebut

Kejelasan Informasi (*Clarity*)

Aspek kedua yang disoroti oleh Edward III dalam rangka komunikasi kebijakan adalah kejelasan (*clarity*) komunikasi. Dikatakan bahwa jika suatu kebijakan dapat diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi tersebut harus jelas. Ketidaktepatan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan pesan awal.

Hasil penelitian sebagaimana telah dideskripsikan di atas menunjukkan kejelasan informasi dalam komunikasi yang dilakukan aparatur pemerintah dalam penanganan covid-19 masih belum maksimal karena masih ditemukan masyarakat belum memahami tentang pentingnya menjaga kesehatan dengan melakukan protokol kesehatan dan melaksanakan vaksinasi. Dengan tidak memahami penjelasan informasi ini membuat kesadaran masyarakat dalam melakukan protokol kesehatan seperti menggunakan masker masih rendah, masih ditemukan masyarakat berkumpul ditempat keramaian seperti warung dan cafe.

Selanjutnya dalam program vaksinasi pertama sudah mencapai target pemerintah sebesar 79,78 persen, sedangkan vaksin kedua sebesar 52,2 Persen dan masih belum mencapai target. Berdasarkan temuan di lapangan bahwasanya masyarakat masih takut untuk mengikuti program vaksinasi karena mendapatkan informasi yang tidak jelas terkait dampak dan efek setelah dilakukan vaksin dan hanya menginginkan sertifikatnya saja. Ini membuktikan bahwasanya aparatur pemerintah belum secara maksimal memberikan penjelasan kepada masyarakat manfaat dan kegunaan vaksinasi.

Pada proses penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Kuantan Singingi juga ditemukannya masyarakat yang tidak bisa memanfaatkan secara maksimal dana bantuan sosial yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena dampak

Covid-19 namun digunakan untuk keperluan lainnya seperti membeli barang, membayar kredit dan keperluan yang bukan untuk kebutuhan sehari-hari.

Konsistensi Informasi (*Consistency*)

Aspek ketiga yang menurut Edward III juga penting dalam komunikasi suatu kebijakan publik adalah konsistensi. Dikatakan oleh Edward III dalam Widodo (2011), kekonsistenan sangat diperlukan apabila ingin implementasi setiap kebijakan akan berjalan dengan efektif meskipun pemerintah sudah melakukan penjelasan yang baik kepada masyarakat. bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Akan ada beberapa perseolan apabila pemerintah tidak melakukan suatu kebijakan dengan konsisten seperti kesalahan penafsiran yang akan terjadi pada pelaksana dan tentunya kepada masyarakat. Apabila hal ini terjadi akan terjadi keputusan dan tindakan yang longgar tentunya akan berdampak pada implementasi kebijakan dan akan terjadi ketidakefektifan..

Komunikasi yang dilakukan oleh aparaturnya pemerintah kepada masyarakat dalam penanganan Covid-19 belum berjalan dengan konsisten, berdasarkan temuan dilapangan bahwasanya aparaturnya pemerintah hanya melakukan beberapa kali memberikan edukasi dan pemahaman secara langsung dengan mengunjungi beberapa tempat keramaian. Masyarakat lebih banyak mengetahui informasi tentang perkembangan, pemahaman dan edukasi tentang protokol kesehatan dan manfaat mengikuti vaksinasi melalui media televisi dan media sosial.

Selanjutnya dalam penelitian ini juga ditemukan bahwasanya pemasangan baliho dan spanduk dalam memberikan edukasi dan informasi tentang penanganan Covid-19 hanya dipasang di wilayah kecamatan, baliho dan spanduk tidak dijumpai didesa-desa yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi.

Faktor penghambat Komunikasi sumber daya aparaturnya pemerintah dalam penanggulangan covid-19 kepada masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan penelitian ini, maka ditemukan beberapa faktor penghambat seperti kurangnya jumlah aparaturnya pemerintah ditingkat kelurahan hingga desa dalam memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan mengajak untuk melaksanakan vaksinasi. Pemerintah lebih terfokus didaerah-daerah yang berdekatan dengan Kabupaten dan Kecamatan saja. Minimnya jumlah aparaturnya pemerintah juga berpengaruh dalam mendata jumlah penerima bantuan sosial yang berhak menerima dalam rangka pemulihan perekonomian masyarakat yang berdampak Covid-19 ini.

Tingkat pendidikan masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam melakukan komunikasi aparaturnya pemerintah untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Kuantan Singingi, masih ditemukan masyarakat yang tidak percaya dengan keberadaan virus corona ini. Selanjutnya masyarakat juga belum memahami secara keseluruhan anjuran dan pemahaman yang diberikan oleh aparaturnya pemerintah karena keterbatasan bahasa dalam berkomunikasi.

Faktor selanjutnya kurangnya anggaran atau finansial dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat, salahsatunya adalah minimnya baliho dan spanduk-spanduk yang terpasang disetiap daerah di Kabupaten Kuantan Singingi. Selain itu juga terdapat minimnya anggaran untuk honor yang diberikan kepada aparaturnya pemerintah yang melakukan komunikasi dengan masyarakat dalam penanganan covid-19 di Kabupaten Kuantan Singingi

SIMPULAN

Aspek transmisi dalam komunikasi sumber daya aparaturnya pemerintah dalam penanggulangan penyebaran covid-19 kepada masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingisudah berjalan baik, ini bisa dilihat bahwasanya Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengikuti dialog dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dalam melakukan penanggulangan pemyebaran covid-19. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan Instruksi Bupati dan Surat Edaran sebagai tindaklanjut Instruksi

Pemerintah Provinsi Riau dan dikoordinasikan kepada *stakeholders* seperti Forum Pimpinan Daerah, Satuan Tugas (Satgas) Covid, Kepala Dinas, Camat, Lurah hingga relawan. Namun transmisi dalam penanggulangan ekonomi dengan memberikan Bantuan Sosial kepada masyarakat yang berdampak Covid-19 tidak berjalan dengan maksimal karena masih ditemukan masyarakat tidak mengetahui program sosial yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Kejelasan informasi dalam komunikasi yang dilakukan aparatur pemerintah dalam penanganan covid-19 masih belum maksimal karena masih ditemukan masyarakat belum memahami tentang pentingnya menjaga kesehatan dengan melakukan protokol kesehatan dan melaksanakan vaksinasi, Pada proses penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Kuantan Singingi juga ditemukannya masyarakat yang tidak bisa memanfaatkan secara maksimal dana bantuan sosial yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Komunikasi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat dalam penanganan Covid-19 belum berjalan dengan konsisten, berdasarkan temuan dilapangan bahwasanya aparatur pemerintah hanya melakukan beberapa kali memberikan edukasi dan pemahaman secara langsung dengan mengunjungi beberapa tempat keramaian.

Faktor penghambat seperti kurangnya jumlah aparatur pemerintah ditingkat kelurahan hingga desa dalam memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan pendataan penerima bantuan sosial. Minimnya tingkat pendidikan sehingga masih ditemukan masyarakat yang tidak percaya dengan keberadaan virus corona ini. Selanjutnya masyarakat juga belum memahami secara keseluruhan anjuran dan pemahaman yang diberikan oleh aparatur pemerintah karena keterbatasan bahasa dalam berkomunikasi. Kurangnya anggaran dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat, salahsatunya adalah minimnya baliho dan spanduk-spanduk yang terpasang disetiap daerah di Kabupaten Kuantan Singingi

DAFTAR PUSTAKA

- Instruksi Bupati Kuantan Singingi Nomor 480/INS/2021/635 tentang pelaksanaan kegiatan penanggulangan dan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19)
- J.R, Raco, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulan*. Grasindo. Jakarta
- Livana "Dampak Pandemi COVID-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa" *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, Vol 1, Nomor 1, 2020. dalam <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/IJNHS>
- Moleong, Lexy j. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet. Bandung
- Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayu Media. Malang
- Wirman Susandi. <https://www.goriau.com/berita/baca/penyebaran-covid19-di-kuansing-mengkhawatirkan-ini-rekomendasi-idi-untuk-penanganannya.html>